

Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization

2721-2149 [Online]

Tersedia online di: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/jpai>

Persepsi Guru Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Di MTs Negeri 1 Manado

Dr. Moh. S. Rahman, M.Pd.I

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Manado

syakurrahman@iain-manado.ac.id

Dra. Nurhayati, M.Pd.I

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Manado

nurhayati@iain-manado.ac.id

Dwi Wahyuni Maulana Luawo

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Manado

dwi.luawo@iain-manado.ac.id

Abstrak

Skripsi ini meneliti tentang Persepsi Guru Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di MTs Negeri 1 Manado. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Persepsi Guru Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di MTs Negeri 1 Manado.

Dalam Penelitian ini ada 3 rumusan masalah yaitu Bagaimana persepsi guru terhadap kebijakan merdeka belajar mengenai penyederhanaan RPP di MTs Negeri 1 Manado dan bagaimana kendala dalam penyusunannya serta solusi dari permasalahan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap kebijakan merdeka belajar tentang

penyederhanaan RPP yaitu dengan adanya kebijakan penyederhaan RPP ini sangat membantu para guru dalam hal administrasi yang tidak memerlukan waktu banyak dalam penyusunan RPP. Apapun kendala dalam penyusunan RPP yang akan disederhanakan yaitu guru kebingungan dalam menyederhanakan 13 komponen ke dalam 3 komponen, guru-guru juga kesulitan dalam menentukan versi RPP yang akan dipakai. Solusi yang digunakan dalam kendala tersebut yaitu dari guru sendiri mereka membuat perkelompok matapelajaran untuk menyatukan ide-ide dalam merancang 13 komponen kedalam 3 komponen yang ada di RPP kemudian Wakil kepala madrasah bidang kurikulum selalu mengadakan rapat musyawarah setiap minggunya untuk mengetahui perkembangan dari penyusunan RPP tersebut.

Kata kunci: Persepsi, Merdeka Belajar, Penyederhanaan RPP.

Abstract

Teachers' perceptions of the independent learning policy about simplifying lesson plans at MTs Negeri 1 Manado. This thesis examines the teacher's perception of the policy of independent learning about the Simplification of the Learning Implementation Plan (RPP) at MTs Negeri 1 Manado. The purpose of this study was to find out how the teacher's perception of the independent learning policy regarding the Simplification of the Learning Implementation Plan (RPP) at MTs Negeri 1 Manado.

In this study, there are 3 formulations of the problem, namely how the teacher's perception of the independent policy of learning about the simplification of lesson plans at MTs Negeri 1 Manado and how the obstacles in its preparation and solutions to these problems are.

This type of research is a descriptive qualitative research. The results showed that the teacher's perception of the policy of independent learning about the simplification of the lesson plan was that the policy of simplifying the lesson plan was very helpful for teachers in terms of administration which did not require a lot of time in preparing the lesson plan. Whatever the obstacles in the preparation of the RPP that will be simplified, namely the teacher is confused in simplifying the 13 components into 3 components, but it must be clear in the RPP, the teachers also have difficulty in determining the version of the RPP that will be used. The solution used in this problem is that from the teachers themselves they make subject groups to unite ideas in designing the 13 components into the 3 components in the RPP then the Deputy head of the madrasa in the curriculum field always holds a deliberation meeting every week to find out the progress of the preparation of the RPP.

Keywords: Perception, Freedom of Learning, Simplification of RPP

Pendahuluan

Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 dijelaskan bahwa, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai penyelenggaraan kegiatan pembelajaran baru untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹

Pada bulan Desember tahun 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) mengemukakan kebijakan baru dalam dunia pendidikan yaitu “Merdeka Belajar”.² Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Mendikbud dengan pokok-pokok kebijakan yang terdiri atas Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Dijelaskan pula bahwa dengan kebijakan tersebut guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu pokok kebijakan yang menjadi fokus permasalahan dan kemudian akan diteliti oleh penulis, yaitu pokok kebijakan tentang penyederhanaan RPP, sebelumnya dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan secara komprehensif mengenai perencanaan pembelajaran yang membahas tentang silabus dan RPP.

Namun mengingat bahwa kebijakan tersebut masih baru dikeluarkan sehingga membutuhkan kesiapan dari berbagai komponen termasuk juga sekolah. Karena sekolah dan guru merupakan subjek utama dikeluarkannya kebijakan penyederhaan RPP ini, karena guru yang secara langsung berhubungan dalam penyusunan RPP sebagai salah satu perencanaan pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran.

¹Republik Indonesia, Undang-undang R.I. No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²Alaika M. Bagus Kurnia PS, *Menyorot Kebijakan Merdeka Belajar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 6

Permasalahan dalam penyusunan RPP oleh guru khususnya guru mata pelajaran Akidah Akhlak, Al-Quran Hadits, Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di MTs Negeri 1 Manado berdasarkan kebijakan RPP baru antara lain (1) guru kesulitan dalam menentukan versi format RPP (2) guru kesulitan dalam menyusun 13 komponen yang akan disederhanakan kedalam 3 komponen pada RPP 1 lembar (3) guru kesulitan dalam menentukan media/sumber belajar dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini sehingga seluruh media pembelajaran dan sumber belajar menggunakan *E-Learning* dan *E-Book*.³

Pentingnya penelitian ini sebagai calon guru tentunya akan dihapkan dengan berbagai macam administrasi salah satunya RPP karena RPP adalah sebagai pedoman bagi guru dalam kelas. Maka dari itu penelitian penting untuk diteliti, dengan adanya penelitian ini maka calon guru yang nantinya akan menyusun RPP yang akan di sederhanakan dengan menjadi 1 lembar ini akan lebih paham dengan penyusunannya.

Kajian Teori

Guru dan Kebijakan Merdeka Belajar

Guru merupakan pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu.⁴

Demikian halnya dengan guru rumpun PAI. Guru rumpun PAI bertugas memberikan keterampilan, pengetahuan keagamaan serta menanamkan sikap hidup beragama didalam proses pendidikan dan pengajaran. Agar para siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan agama Islam tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan keagamaan (*knowledge*) saja, tetapi juga nilai-

³Kadek Yogi Mayudana, "Analisis Kebijakan Penyederhanaan RPP (Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019)", Vol. 1 No. 1 (April 2020) h.62. <http://repo.ikipgribali.ac.id/id/eprint/985/1/yogi-632-Article%20Text-1516-1-10-20200423.pdf> (17 Mei 2020).

⁴Mu'arif, Wacana Pendidikan Kritis Menelanjangi Problematika, Meretus Masa Depan Pendidikan Kita (Jogjakarta: Ircisod, 2005), h. 198- 199.

nilai (*values*) dalam kehidupan. Banyak sekali pengertian yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan tentang pendidikan agama Islam, singkatnya pengertian guru PAI adalah guru yang mengajar mata pelajaran Akidah akhlak, Al-Qur'an dan Hadis, Fiqih atau Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di madrasah, tugasnya membentuk anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membimbing, mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, ahli dalam materi dan cara mengajar materi itu, serta menjadi suri tauladan bagi anak didiknya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. “Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” demikian disampaikan Mendikbud pada peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12).⁵

Penyusunan RPP, Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. “Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran

⁵Halida Bunga, “Merdeka Belajar adalah Kemerdekaan Berpikir”, *Media Elektronik, Tempo.co*, 13 Desember 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1283493/nadiem-makarim-merdeka-belajar-adalah-kemerdekaan-berpikir>

berlangsung secara interaktif, inspiratif, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Pada prinsipnya, RPP merupakan unsur yang sangat substansial dan harus dibuat oleh setiap guru agar kegiatan pembelajaran berjalan sistematis dan mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Tanpa RPP, biasanya pembelajaran menjadi tidak terarah dan terkontrol. Oleh karena itu, guru harus mampu menyusun RPP dengan lengkap berdasarkan silabus yang disusunnya. Rincian RPP sangat penting bagi seorang guru karena merupakan acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Komponen RPP menurut Permendikbud No 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas: (1) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan (2) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema (3) Kelas/semester (4) Materi pokok (5) Alokasi waktu (6) Tujuan pembelajaran (7) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi (8) Materi pembelajaran (9) Metode pembelajaran, (10) Media pembelajaran (11) Sumber belajar (12) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, dan (13) Penilaian hasil pembelajaran.

Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud No 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP dinyatakan bahwa, Menindaklanjuti Permendikbud terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013, dinyatakan bahwa: (1) Penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid (2) Bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Kemendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran *assessment* yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap (3) Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Matar Pelajaran (KKG/MGMP), dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-sebesarannya keberhasilan belajar murid (4) Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3.⁶

⁶Wachyu Sundayana, *Telaah Kurikulum & Perencanaan Pembelajaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), h. 12.

Dengan demikian jelas, bahwa pada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang, menyatakan dalam RPP dikenal komponen inti RPP yakni (1) tujuan pembelajaran, (2) langkah-langkah pembelajaran, dan, (3) penilaian pembelajaran *assessment*, sedangkan 10 komponen lainnya disebut komponen penunjang. Namun demikian, suatu kebijakan tentunya akan ada penyesuaian dari waktu ke waktu.

Kebijakan Merdeka Belajar di Sekolah

1. Aturan Kebijakan Merdeka Belajar di MTs Negeri 1 Manado

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Pembuatan soal maupun penyelenggaraan USBN akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Sekolah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan ujian, karena diselenggarakan oleh sekolah maka menjadi tugas pemerintah daerah melalui dikbud untuk memonitor dan mengevaluasi serta memastikan bahwa ujian yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah ujian yang berkualitas.⁷

Ujian Nasional (UN)

Hasil dari *assesmen* ini akan dijadikan sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Selain asesmen kompetensi, akan diberlakukan juga survei karakter, dimana survei karakter ini digunakan untuk mengetahui karakter anak dan bagaimana keadaan lingkungan di sekolah.

Penyederhanaan RPP

Dengan adanya kebijakan ini, guru akan lebih mudah dan diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP seefektif dan seefisien mungkin, akan tetapi tetap berorientasi pada perkembangan anak sesuai dengan peraturan yang ada.

Memperluas sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru

⁷Alaika M. Bagus Kurnia PS, *Menyorot Kebijakan Merdeka Belajar*, h. 20

Zonasi merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tercipta pemerataan akses layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan nasional.⁸

2. Kebijakan Merdeka Belajar di MTs Negeri 1 Manado

Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI terkait dengan konsep merdeka belajar adalah:

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) resmi menghapus Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan USBN mulai tahun ini. Penghapusan USBN merupakan amanat Mendikbud Nadiem Makarim yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.

Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional akan diganti dengan sistem yang baru, yaitu Assesmen kompetensi minimum dan survei karakter.⁹ Dengan dihapuskannya UN ini, diharapkan akan membuat siswa tidak mengalami tekanan beban mental, karena kelulusannya dari jenjang pendidikan tertentu tidak ditentukan oleh nilai yang diperoleh hanya dalam beberapa hari saja.

Penyederhanaan RPP

Kebijakan baru terkait dengan penyusunan RPP telah dikeluarkan oleh menteri pendidikan yang tertuang dalam Surat Edaran No 14 tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP. Berbeda dengan RPP sebelumnya yang mencakup lebih dari sepuluh komponen, pada RPP yang baru terjadi penyederhanaan yaitu hanya terdapat 3 komponen inti dalam RPP yang sesuai dengan edaran menteri pendidikan

⁸Kadek Yogi Mayudana dan Komang Sukendrah, "Analisis Kebijakan Penyederhanaan RPP (Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019)" 69.

⁹ Wahidmurni, "Rencana Pelaksanaan Pembelajaran: RPP 1 Lembar" (Disajikan dalam Perkuliahan Pembelajaran Tematik Program Studi Pendidikan IPS dan Program Studi Pendidikan Guru MI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap 2019/2020), Januari 2020, h. 11, <http://repository.uin-malang.ac.id/5377/1/5377.pdf>

no 14 tahun 2019 yaitu; tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau assesment.

Metode

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Sedangkan Teknik pengolahan dan Analisis data menggunakan 3 model dari Miles dan Huberman: (1) Reduksi Data (2) Penyajian Data (3) Triangulasi Waktu. Penelitian dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 yang merupakan Sekolah bercirikan Agama Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama dan satu-satunya Madrasah Tsanawiyah Negeri yang ada di kota Manado. Lokasi atau tempat yang akan menjadi objek pada penelitian ini berlokasi pada Jl. Bailang Raya No.293, Bailang, Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sedangkan penelitian ini membutuhkan waktu 3 bulan dimulai pada bulan April 2021 hingga Juni 2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 data yaitu primer dan sekunder. Uji keabsahan data menggunakan Triangulasi dan metode analisisnya menggunakan deskriptif analitik yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil

1. Persepsi Guru Terhadap Merdeka Belajar Tentang Penyederhanaan RPP di MTs Negeri 1 Manado

Guru sangat terlibat dan bertanggung jawab dengan RPP 1 lembar karena namanya guru tidak lepas dari RPP yaitu salah satu administrasi mereka. Adanya kebijakan baru terkait merdeka belajar dan penyederhanaan RPP pastinya yang sangat berdampak pada guru sendiri dimana guru lebih dimudahkan dalam hal administrasi mereka. Para guru memiliki inti persepsi yang sama terhadap kebijakan tersebut akan tetapi dalam menanggapi hal itu berbeda-beda. berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru-guru di MTs Negeri 1 Manado:

Syamsul Lasehi guru mata pelajaran al-Qur'an hadis mengutarakan pendapatnya:

Menurut saya pribadi kalau dibandingkan dengan RPP yang lama dengan RPP 1 lembar ini lebih memudahkan para guru dalam menyusun RPP serta dalam memahami RPP tersebut juga karena yang awalnya terdapat 13 komponen sehingga menyebabkan RPP menjadi berlembar-lembar itu sebagian guru tidak kemudian membaca RPP keseluruhan isi RPPnya jadi sebenarnya dengan adanya RPP 1 lembar ini dapat membantu guru dalam memahami isi dari RPP tersebut. Sebenarnya dengan adanya RPP 1 lembar ini mendikbud bertujuan untuk supaya para guru menyederhanakan ya dari 13 komponen kemudian menjadi 3 komponen ini yang memudahkan dan kemudian menjadikan tujuan pembelajaran ini lebih jelas hal tersebut dari 1 buku yang tebal kemudian dibuatlah kesimpulan dalam 1 kesimpulan tersendiri hanya dengan 1 lembar akan tetapi makna dan tujuannya sama saja".¹⁰

Sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum yang berperan penting terkait kurikulum, dan RPP yang diberlakukan di MTs Negeri 1 Manado, Marlina Maladjim memiliki tanggung jawab penuh terkait penerapan dari penyederhanaan RPP yang di terapkan di MTs Negeri 1 Manado, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Penyederhanaan RPP atau RPP 1 lembar tujuan dari kemdikbud dari kebijakan tersebut yaitu untuk mengurangi beban administrasi dari guru hal tersebut diharapkan dari semua guru sebab dengan RPP yang begitu banyak atau berlembar-lembar dapat menguras waktu banyak untuk menyusunnya apalagi ada beberapa guru yang mengajar beberapa mata pelajaran guru tersebut harus menyusun RPP yang banyak sementara dia juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, belum juga dengan administrasi-administrasi yang lainnya yang harus di sediakan guru. Maka dari itu dengan adanya kebijakan ini dapat membantu guru untuk kembali pada tugas dan fungsinya."¹¹

Bagi Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum seperti persepsi yang sudah di utarakan bisa dilihat bahwa dengan adanya kebijakan penyederhanaan RPP ini sangat memudahkan bagi guru dalam hal administrasinya kemudian waka kurikulum juga

¹⁰Syamsul Lasehi, Guru Al-Qur'an Hadits MTs Negeri 1 Manado, Wawancara, depan Ruang TU Madrasah MTs Negeri 1 Manado, Senin 19 April 2021, pukul 09.40 Wita.

¹¹Marlina Maladjim, Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum MTs Negeri 1 Manado, Wawancara, Ruang waka kurikulum MTs Negeri 1 Manado, Rabu 21 April 2021, pukul 09.33 Wita.

beranggapan bahwa dengan demikian guru dengan mudah pengumpulan RPP yang menjadi lebih sedikit dan sederhana dan terarah.

Dapat dilihat juga dari persepsi kepala madrasah sebagai kepala madrasah yang berperan penting dalam segala bidang yang ada dalam Madrasah kepala madrasah tentunya harus mengetahui isu-isu pendidikan dan kebijakan-kebijakan yang baru dikeluarkan dalam hal ini kebijakan mendikbud tentang penyederhanaan RPP, walaupun RPP ini adalah tanggung jawab besar wakil kepala Madrasah bidang kurikulum tetapi kepala madrasah Fadli Noh juga tak kalah penting dalam tanggung jawabnya dari segi administrasi bagi guru khususnya RPP yang diterapkan di MTs Negeri 1 Manado, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Tujuan dari penyederhanaan RPP atau RPP 1 lembar dari Kemendikbud bahwa kebijakan tersebut yaitu untuk mengurangi beban administrasi dari guru hal tersebut yang diharapkan dari semua guru sebab dengan RPP yang begitu banyak halaman dapat menguras waktu banyak untuk menyusunnya apalagi ada guru yang mengajar beberapa mata pelajaran maka guru tersebut harus menyusun RPP yang banyak sementara dia juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, belum juga dengan administrasi-administrasi yang lainnya yang harus di sediakan guru. Maka dari itu dengan adanya kebijakan ini dapat membantu guru untuk kembali pada tugas dan fungsinya dalam kelas. Dalam hal ini hak dan kewajiban sebagai pendidik bisa lebih focus dalam proses pembelajar dan bisa lebih kreatif dalam pembelajaran sehingga tidak terbebani dengan penyusunan RPP yang banyak halaman dan menguras waktu banyak kemudian hak dan kewajiban sebagai peserta didik yaitu peserta didik mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan lebih semangat dalam belajar.¹²

Berdasarkan persepsi dari Fadli Noh diatas selaku kepala madrasah adanya kebijakan ini sudah diatur dalam Permendikbud dan Kementrian Agama didalam merdeka belajar guru harus memperhatikan yang sifatnya efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Efisien yaitu guru tidak lagi dibebani dengan yang berhubungan dengan administrasinya RPP dengan jumlah halaman yang banyak, efektif yaitu guru akan kembali pada tugas utamanya yaitu mengajar dalam kelas, dan berorientasi pada peserta didik yaitu guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi yang dibutuhkan oleh peserta didik.

¹²Fadli Noh, Kepala Madrasah MTs Negeri 1 Manado, Wawancara, Ruang kepala Madrasah MTs Negeri 1 Manado, Kamis, 22 April 2021, pukul 09.11 Wita.

Setelah penulis menguraikan bagaimana persepsi Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum, dan para guru terhadap persepsi penyederhanaan RPP atau RPP 1 lembar maka berikut penulis akan menjabarkan hasil angket yang telah didapatkan dari penelitian.

Persepsi Guru Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di MTs Negeri 1 Manado

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Cukup (C)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Tabel 1. Instrumen Lembar Pedoman Angket Untuk Guru

No.	Aspek-aspek yang dinilai	Kriteria penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Guru wajib menyusun RPP	0	0	0	0	10
2	Guru selalu membawa RPP sebelum mengajar	0	0	1	4	5
3	RPP sebagai pedoman kegiatan pembelajaran dalam kelas	0	0	0	2	8
4	Guru merasa terbebani dengan penyusunan RPP yang mencakup 13 komponen	1	2	3	4	0
5	Guru mengetahui tentang kebijakan merdeka belajar tentang penyederhanaan RPP	0	0	2	4	4
6	Guru menyusun RPP 1 lembar sesuai peraturan surat edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP	0	0	0	2	8
7	Guru memiliki surat edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP	0	0	2	4	4
8	Guru menyusun RPP 1 lembar dengan jelas dan kreatif	0	0	0	6	4
9	RPP 1 lembar dapat memudahkan guru dalam hal administrasi	0	0	1	1	8

Persepsi Guru Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Di MTs Negeri 1 Manado

10	Penyusunan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga	0	0	1	5	4
11	Penyusunan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran	0	0	0	2	8
12	Penyusunan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas	0	0	0	4	6
13	Guru dapat tetap menggunakan format RPP yang lama yang telah dibuatnya	0	1	0	9	0
14	Guru menyusun RPP hanya dengan 3 komponen inti	0	0	1	5	4
15	Guru merasa RPP cukup jelas hanya dengan 1 lembar	0	0	1	5	4
16	3 komponen inti bisa ditambah dengan komponen yang lain yang dianggap perlu bagi guru	1	0	0	6	3
17	Guru mengalami kesulitan dalam penyusunan RPP 1 lembar	4	3	1	2	0
18	Guru memberikan materi sesuai yang tertera dalam RPP 1 lembar	0	0	1	5	4
19	Guru mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD)	0	0	0	4	6
20	Penilaian siswa tetap jelas di dalam RPP 1 lembar	0	0	0	6	3
21	Kegiatan Pembelajaran tetap sama walaupun hanya dengan RPP 1 lembar	0	0	0	7	3

Persepsi Peserta Didik Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di MTs Negeri 1 Manado

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
 2 = Tidak Setuju (TS)
 3 = Cukup (C)

4 = Setuju (S)

5= Sangat Setuju (SS)

Tabel 2. Instrumen Lembar Pedoman Angket untuk Peserta Didik

No.	Aspek-aspek yang dinilai	Kriteria penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Siswa mengetahui adanya RPP 1 lembar	0	9	3	4	0
2	Adanya perubahan dalam kegiatan pembelajaran saat adanya RPP 1 lembar	0	3	5	4	4
3	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada awal pembelajaran atau awal pertemuan	0	0	0	7	9
4	Guru memberikan himbau kepada siswa tentang covid-19 pada awal pembelajaran	0	0	2	9	5
5	Guru memberikan arahan kepada peserta didik tentang penggunaan media pembelajaran yang dipakai	0	0	0	8	8
6	Kesesuaian materi pembelajaran dengan penjelasan guru	0	0	0	8	8
7	Siswa dibatasi waktu yang sedikit saat pembelajaran	1	2	10	2	1
8	Siswa paham dengan materi yang dijelaskan guru	0	0	4	7	5
9	Guru menanyakan kendala yang dihadapi saat pembelajaran daring	0	0	3	8	5
10	Guru kreatif dalam menumbuhkan semangat belajar siswa	0	0	2	7	7
11	guru memberikan contoh atau perbandingan materi dengan pengalaman yang ada	0	0	2	5	9
12	Guru memotivasi peserta didik aktif dalam pembelajaran	0	0	3	10	3
13	Siswa merasa senang saat pembelajaran	0	0	4	9	3

14	Alokasi waktu mengajar guru sesuai dengan alokasi waktu yang di tetapkan	0	1	8	4	3
15	guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi pembelajaran sebelumnya	0	0	1	10	5
16	Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika belum mengerti	0	0	1	7	8
17	Guru menjalin komunikasi yang baik dengan siswa	0	0	0	6	10
18	Guru menginformasikan materi pembelajaran selanjutnya	0	0	2	9	5

Angket yang disebarakan kepada guru sebanyak 10 angket yang merupakan 2 guru Al-Qur'an hadits yaitu bapak Syamsul Lasehi dan bapak Tahir, 1 guru mata pelajaran akidah akhlak yaitu ibu Sity Nurhalimah, 2 guru mata pelajaran fiqh yaitu bapak Hiban Ali dan ibu Irawati Domili dan 3 guru SKI yaitu bapak Rico Mooduto bapak Abdul Appan dan ibu Patimasang dan juga kepala Madrasah bapak Fadli Noh serta wakil kurikulum ibu Marlina , sedangkan angket yang disebarakan kepada peserta didik sebanyak 16 peserta didik. Penyebaran angket dilakukan setelah mendapat izin penelitian dari pihak sekolah yakni kepala tata usaha. Penyebaran angket secara langsung oleh peneliti.

2. Kendala Guru Dalam Penyusunan Penyederhanaan RPP di MTs Negeri 1 Manado

Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang awalnya terdiri dari 13 komponen dan terdapat dalam banyak halaman yang kemudian disederhanakan menjadi 3 komponen dan dibatasi dalam 1 lembar pastinya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dilaksanakan setiap guru pun berbeda-beda, berdasarkan hasil wawancara:

Kendala Syamsul Lasehi guru mata palajaran Al-Qur'an Hadits tentang penyederhanaan RPP:

Kendalanya pada awal pembuatan pastinya guru merasa kebingungan karena hal ini diibaratkan 1 buku tebal kemudian dibuatlah 1 kesimpulan hanya dengan 1 lembar saya juga pada saat itu merasa kebingungan dengan bentuk format

atau versi yang akan digunakan karena ada beberapa versi yang dikeluarkan oleh mendikbud.

Penjelasan Syamsul Lasehi diatas menyatakan bahwa dirinya butuh waktu untuk menyesuaikan dengan penyusunan RPP yang baru karena terbiasa menggunakan RPP yang terdapat banyak halaman kemudian sekarang berubah menjadi 1 lembar saja, maka dari itu Samsul Lasehi mendapati kebingungan pada awal penyusunannya.

Berbeda dengan Siti Nurhalima yang tidak mendapati kendala dalam penyusunan RPP 1 lembar dikarenakan sudah fasih dalam pembuatan RPP hal tersebut dibuktikan sebagai berikut:

Guru itu dituntut harus kreatif dalam mengembangkan potensi dirinya meski seperti keadaan sekarang pembelajaran daring guru harus mampu lebih mengasah kemampuannya kreatifitasnya agar pembelajaran akan tetap menyenangkan begitu pun dengan kebijakan2 baru melalui isu-isu yang beredar maka guru itu harus mencari informasi-informasi terkait isu-isu tersebut. Saya tidak mendapati masalah aatau kendala dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 1 lembar ini karena saya sudah mengetahui lebih dulu baimana susunannya sebelum adanya sosialisasi dari wakil kepada Madrasah MTs Negeri 1 Manado.¹³

Dari penjelasan Siti Nurhalima diatas bahwa seorang guru harus aktif mencari informasi mengenai isu-isu pendidikan yang beredar, guru harus ikut *update* maka dari itu Siti Nurhalima tidak mendapati kendala saat menyusun RPP 1 lembar karena Sity Nurhalima telah mencari informasi-infomasi dan mengamati terlebih dahulu kebijakan mengenai RPP 1 lembar tersebut sebelum Wakil Kepala madrasah bidang kurikulum mengadakan sosialisasi kepada para guru di MTs Negeri 1 Manado.

3. Solusi Guru Dalam Penyusunan Penyederhanaan RPP di MTs Negeri 1 Manado

Terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi para guru untuk menghadapi kendala-kendala tersebut pastinya para guru memiliki cara ataupun solusi terkait menghadapi kendala-kendala itu. Berdasarkan hasil wawancara:

¹³Siti Nurhalimah, *Guru Aqidah Akhlak MTs Negeri 1 Manado*, Wawancara, depan Ruang Guru Madrasah MTs Negeri 1 Manado, Senin 19 April 2021, pukul 11.00.

Adapun Solusi yang digunakan dari Syamsul Lasehi guru mata pelajaran al-Qur'an Hadis tentang penyederhanaan RPP:

Solusinya kalau dari saya harus ada komunikasi dengan para guru senior dan meminta saran pastinya mereka sudah lebih paham tentang penyusunannya wakil kepala madrasah bidang kurikulum juga sering mengadakan sosialisasi mengenai kebijakan baru ini yaitu RPP 1 lembar.¹⁴

Dari penjelasan diatas Syamsul Lasehi mempunyai solusi dari kendala yang dihadapinya dengan menjalin komunikasi bersama para guru senior agar jika ada yang akan ditanyakan bisa langsung ditanyakan kepada guru senior dan juga wakil kepala madrasah bidang kurikulum sering mengadakan sosialisasi bersama para guru.

Kendala Rico Mooduto guru mata pelajaran Al-Qur'an Hadits juga mendapati solusi dari kendala yang di hadapi tentang penyusunan penyederhanaan RPP atau RPP 1 lembar:

Namanya guru kami dituntut untuk kreatif dalam mencapai tujuan, saya dan kami para guru saling membantu dan saling membutuhkan terutama dalam rumpun PAI sama-sama saling mengarahkan dan bertukar pendapat mengenai penyederhanaan RPP.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa solusi yang digunakan dalam menghadapi kendala-kendala terhadap penyederhanaan RPP menjadi 1 lembar ini yaitu dengan saling membantu, mengarahkan, dan pastinya selalu bertanya terkait apa yang tidak dipahami dan juga meminta saran dari guru senior yang lebih mengetahui.

Pembahasan

1. Persepsi Guru Terhadap Merdeka Belajar Tentang Penyederhanaan RPP di MTs Negeri 1 Manado

¹⁴Syamsul Lasehi, Guru Al-Qur'an Hadits MTs Negeri 1 Manado, Wawancara, depan Ruang TU Madrasah MTs Negeri 1 Manado, Senin 19 April 2021, pukul 09.40 Wita.

Sebelumnya telah dipaparkan atas hasil penelian tentang persepsi guru terhadap merdeka belajar tentang penyederhanaan RPP di MTs Negeri 1 Manado. persepsi para guru terhadap merdeka belajar khususnya penyederhanaan RPP menuai banyak respon yang sangat baik dari para guru dan mengapresiasi kebijakan pendidikan mendikbud yang akan menyederhanakan RPP. Selama ini beban administrasi yang ditimbulkan dari penyusunan RPP sering dikeluhkan para guru.

Dengan adanya penyederhanaan RPP sesuai dengan Permendikbud nomor 14 tahun 2019 pada bulan Desember merupakan salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Nadiem Makarim, ia menyebutkan penyederhanaan RPP ini didedikasi untuk para guru agar menringankan beban administrasi guru, hal ini memang terbukti berdasarkan hasil wawancara kepada guru di MTs Negeri 1 Manado bahwa para guru merasa diringankan dengan adanya kebijakan baru tersebut.

2. Kendala Guru Dalam Penyusunan Penyederhanaan RPP di MTs Negeri 1 Manado

Setelah melakukan wawancara dengan para informan penelitian, penulis mendapatkan dua kendala yang di hadapi guru dalam penyusunan penyederhanaan RPP atau RPP 1 lembar, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan penyederhanaan RPP yang dikeluarkan difokuskan pada tiga komponen utama yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (*assessment*). Hal tersebut membuat guru merasa kebingungan karena seperti yang saya bilang tadi ini diibaratkan 1 buku tebal kemudian dibuatlah 1 kesimpulan hanya dengan 1 lembar.
- b. Format atau versi RPP berdasarkan surat edaran mendikbud No. 14 Tahun 2019 memiliki beberapa perbedaan apabila dibanding dengan pengaturan sebelumnya dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Terhadap beberapa penyederhanaan terkait dengan komponen yang terdapat dalam RPP.
- c. Guru kesulitan dalam menentukan media/sumber belajar dikarenakan adanya pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehingga seluruh media pembelajaran dan sumber belajar menggunakan *E-Learning* dan *E-Book*.¹⁵ Sehingga dalam

¹⁵ M. Sobry Sutikno, *Belajar dan Pembelajaran* (Bandung: Prospect, 2009), h. 32.

pelaksanaannya penggunaan media tersebut terdapat beberapa kemudahan yang dirasakan oleh guru dan siswa.

3. Solusi Guru Dalam Penyusunan Penyederhanaan RPP di MTs Negeri 1 Manado

Setelah melakukan wawancara dengan para informan penelitian, penulis mendapatkan dua solusi dari kendala yang di hadapi guru dalam penyusunan penyederhanaan RPP atau RPP 1 lembar, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan melihat adanya kendala yang dihadapi oleh beberapa guru maka wakil kurikulum terus memberikan rapat berskala untuk mengetahui perkembangan dari para guru yang masih kesulitan dalam penyusunan RPP 1 lembar.
- b. Wakil kepala madrasah bidang kurikulum mengelompokkan guru permata pelajaran agar bisa saling bertukar informasi dan bisa merancang RPP dengan bersama.
- c. Mencari informasi dari guru senior dan mencari referensi dari internet.
- d. Pihak MTs Negeri 1 Manado menyediakan pendampingan untuk guru sehingga dapat memudahkan dalam proses pembelajaran.

Dari hasil penelitian yang ada bahwa penerapan kebijakan merdeka belajar tentang penyederhanaan RPP sudah terlaksana dengan baik hingga saat ini. Peserta didik ikut merasakan bagaimana guru dapat menumbuhkan semangat belajar bagi peserta didik dengan metode pembelajaran yang menyenangkan yang dipakai guru.

Simpulan

Persepsi guru terhadap kebijakan merdeka belajar mengenai penyederhanaan RPP di MTs Negeri 1 Manado yaitu dengan adanya kebijakan penyederhanaan RPP ini dapat membantu sebagian guru dalam hal administrasi hal tersebut membuat guru tidak menguras waktu dalam menyusun RPP. RPP sekarang ini lebih mudah penyusunannya hanya dengan 1 lembar dengan begitu guru-guru

lebih focus pada proses pembelajaran dalam hal ini para guru berusaha untuk kreatif dalam menciptakan suasana belajar yang asik sehingga bisa menumbuhkan semangat belajar bagi peserta didik mulai dari media yang dipakai dalam pembelajaran, metode yang digunakan dalam penyampaian materi, komunikasi guru dengan peserta didik.

Kendala guru dalam penyusunan penyederhanaan RPP di MTs Negeri 1 Manado yaitu ada 3 guru dari 4 guru yang telah diwawancarai merasa kesulitan dalam penyusunannya komponennya yang dimana dari 13 komponen kemudian di sederhanakan menjadi 3 komponen inti saja hal tersebut membuat guru harus berfikir dan kreatif bagaimana 3 komponen tersebut harus jelas dan merangkum 13 komponen lainnya.

Solusi dalam kendala tersebut yaitu para guru mengadakan perkelompok mata pelajaran untuk mendiskusikan dan menuangkan ide-ide dalam menyusun 3 komponen hingga menjadi jelas dan juga dalam menentukan vesrsi RPP 1 lembar yang akan dipakai, dan juga solusi dari waka kurikulum yaitu dengan selalu mengadakan rapat musyawarah antar guru setiap 1 minggu untuk mengetahui perkembangan dari RPP 1 lembar.

Saran

Saran untuk kepala madrasah lebih aktif lagi dalam menerapkan kebijakan belajar di MTs Negeri 1 Manado sehingga semua guru bisa menerapkannya disetiap pembelajaran.

Saran untuk waka kurikulum lebih tegas lagi dalam hal pengumpulan RPP guru selalu memberi peringatan-peringatan kepada guru yang masih suka terlambat mengumpulkan RPP.

Saran untuk guru lebih kreatif lagi dalam menerapkan merdeka belajar dalam kelas agar speserta didik akan merasa lebih senang dan dapat menumbuhkan semnagat belajar untuk lebih kreatif lagi dalam pembuatan RPP.

Referensi

- Alaika M. Bagus Kurnia PS. (2020). *Menyorot Kebijakan Merdeka Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Dakir. (2010). *Perencanaan dan Inovasi Kurikulum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kadek Yogi Mayudana. Komang Sukendrah. (2020). Analisis Kebijakan Penyederhanaan RPP (Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019), *IJED (Indonesian Journal of Educational Development)*, Vol, 1 No 2, April.
- Kebudayaan Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia, *Merdeka belajar*, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, 11 desember 2019.
- Kinasih. (2013). Problematika Guru dalam Penyusunan Perangkat Pembelajaran di SD Muhammadiyah 14 Surakarta, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nur Pratiwi. (2013). Peran Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di MIN Jejeran Wonokromo Pleret Bantul, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kaligaja,
- Tim Penulis. (2006) *Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wachyu Sundayana. (2017). *Telaah Kurikulum & Perencanaan Pembelajaran*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim, juli.